

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya peningkatan pengembangan perekonomian negara secara terencana agar tercapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. (Arka & Yasa, 2015).

Distribusi pendapatan yang lebih adil dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan salah satu dari beberapa elemen yang mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk berkembang secara ekonomi; namun, agar faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor tersebut harus didefinisikan secara akurat. Pembangunan adalah cara untuk mencapai tujuan negara, dan pertumbuhan ekonomi adalah cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan. (Mirza, 2012).

Ada tiga landasan dalam pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas nasional (Jember & Nedo, 2015). Pembangunan ekonomi daerah adalah proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya bekerja sama untuk mengelola sumber daya yang tersedia. Diharapkan bahwa pembangunan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dengan menciptakan lapangan

pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, perekonomian lokal akan berkembang.

Pencapaian kesuksesan program pembangunan nasional melalui pembangunan regional harus dinikmati oleh semua orang sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan fisik dan mental. Namun, perkembangan nasional tidak dapat digeneralisasi mengingat kondisi wilayah di Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti geografi, karakteristik, budaya, kondisi sosial dan sebagainya. Selain itu permasalahan-permasalahan yang ada di setiap daerah juga berbeda-beda diantaranya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya lainnya. Hal tersebut perlu banyak diperhatikan, karena pencapaian keberhasilan pembangunan nasional salah satu indikator dalam menggerakkan laju perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah ekspansi aktivitas ekonomi yang meningkatkan produktivitas masyarakat, kemakmuran dan kesejahteraan mereka. (Agma, 2015). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak berkembang secara bersamaan, setiap wilayah membutuhkan waktu yang berbeda untuk berkembang. Jika pertumbuhan terjadi di salah satu wilayah, pertumbuhan di wilayah yang berdekatan akan segera mengikuti. (Budhi, 2013).

Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda. Untuk dapat meningkatkan perekonomian wilayah sehingga dapat dikelola secara efisien, setiap wilayah harus memilih sektor ekonomi unggulan. (Dewi & Sutrisna, 2014). Menurut Martono (2008), Sebuah wilayah yang menyadari potensi wilayahnya akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing daripada yang tidak menyadarinya. Kebijakan yang berkaitan dengan otonomi regional menawarkan sarana untuk menentukan sektor potensial. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas

pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sehingga diharapkan dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan pendanaan dan pembangunan secara mandiri. (Erawati & Yasa, 2012). Selain itu, diharapkan desentralisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, sehingga potensi wilayah perlu adanya peningkatan untuk mengurangi kemiskinan. (Miranti et al., 2014).

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai oleh daerah apabila prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi dilakukan pada sektor-sektor ekonomi unggulan dan potensial. Prioritas pembangunan ekonomi pada sektor-sektor unggulan dan potensial karena akan mempercepat peningkatan pendapatan, peningkatan konsumsi, dan peningkatan investasi. Selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan mencopot kesempatan kerja baru. Kenaikan pendapatan akan menaikkan permintaan. Dan kenaikan permintaan akan mendorong kenaikan investasi pada industri-industri (Tti Widodo, 2006)

Permasalahan-permasalahan yang timbul mendorong pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan dan diharapkan mampu melaksanakan kebijakan pendanaan serta pembangunan daerahnya sendiri didalam penyelenggaraan pemerintahannya. Agar pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi daerah secara optimal, maka kebijakan disusun menurut tujuan antar sektor sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah acuan.

Demikian pula dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi dalam menjalankan kegiatan atau program pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonominya maka perlu mengetahui bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi untuk melihat berada di

klasifikasi cepat maju dan cepat tumbuh, maju tapi tertekan, berkembang cepat, atau relatif tertinggal daerah tersebut serta mengidentifikasi sektor-sektor mana yang dapat diunggulkan dan dapat memberikan hasil yang cukup baik dan diharapkan sebagai solusi alternatif, sehingga dapat mendukung sektor-sektor lain yang belum berkembang.

Pada periode tahun 2017-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan dan Ngawi tumbuh di level 5% tetapi pada 2020 ekonomi Kabupaten Magetan tumbuh negatif atau terkontraksi sedalam 1,64%. Sedangkan Kabupaten Ngawi tumbuh negatif atau terkontraksi sedalam 1,69%. Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Magetan dan Ngawi bangkit kembali dengan tumbuh sebesar 3,04% dan 2,55%. Dan di tahun 2022 perekonomian Kabupaten Magetan dan Ngawi makin pulih dengan tumbuh sebesar 3,89% dan 3,19%

Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan grafik di bawah ini:

Grafik 1.1
Laju Pertumbuhan Kab. Magetan, Kab. Ngawi dan Prov. Jawa Timur



Sumber : BPS Kabupaten Magetan, Ngawi dan Provinsi Jawa Timur 2023

Berdasarkan grafik kondisi perekonomian Kabupaten Magetan dan Ngawi selama periode tahun 2017-2022 yaitu fluktuatif namun cenderung melambat. Dalam data yang diperoleh dari BPS, di tahun 2022 pertumbuhan tertinggi dari sisi

lapangan usaha dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan dengan angka 17.97% pada Kabupaten Ngawi, angka tersebut lebih tinggi 1.02% jika dibandingkan dengan Kabupaten Magetan yang hanya 16.95%.

Dikutip pada BPS Kabupaten Magetan jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2020 sebanyak 14.283 jiwa mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 369.129 jiwa dan di tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 372.496 jiwa, yang sebagian besar terserap di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan serta Jasa. Namun dalam 5 tahun terakhir tingkat penganggura terbuka cenderung meningkat. Angka pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 4.33%. Sedangkan Kabupaten Ngawi jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2020 sebanyak 495.560 jiwa mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 495.560 jiwa dan di tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 540.407 jiwa, yang sebagian besar terserap di lapangan usaha Pertanian, Manufaktur dan Jasa. Terlihat dalam 5 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ngawi fluktuatif cenderung menurun. Pertumbuhan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Magetan pada tahun 2019 sebesar 3.08% meningkat menjadi 3.74% di tahun 2020 dan di tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 4%. Sedangkan Kabupaten Ngawi tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2019 sebesar 3,60%, meningkat menjadi 5.44% di tahun 2020 tetapi pada tahun 2021 menurun menjadi 4.25% dan di tahun 2022 semakin menurun menjadi 2.48%.

Pulau Jawa dikatakan menjadi indikator perekonomian nasional karena lebih dari separuh kue pembangunan Indonesia dihasilkan di Pulau Jawa. Provinsi

Jawa Timur sendiri menduduki urutan kedua Kontribusi terbesar di Pulau Jawa. Pada periode tahun 2017-2019, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tumbuh di level 5% tetapi pada tahun 2020 ekonomi Provinsi Jawa Timur tumbuh negatif atau berkontraksi sedalam 2,33%. Sedangkan pada tahun 2021 perekonomian Provinsi Jawa Timur bangkit kembali dengan tumbuh sebesar 3,56% dan pada tahun 2022 perekonomian Provinsi Jawa Timur semakin membaik dengan tumbuh sebesar 5.34%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur saat ini sudah kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 di level 5%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Transportasi dan Perdagangan tumbuh sebesar 19.47% diikuti Jasa Lainnya tumbuh sebesar 12.44% dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 9.34%.

Penentuan prioritas pembangunan di kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi merupakan suatu kondisi yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini mengingat keterbatasan pendapatan yang diakibatkan pandemi Covid-19 sehingga seluruh sektor lapangan usaha tidak bisa menghasilkan efektifitas yang tinggi. Banyak sektor yang terhambat menyebabkan pengangguran sehingga meningkatnya kriminalitas dan kemiskinan. Dengan demikian bila sektor satu dibangun maka sektor lain juga harus dibangun, ada kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi di kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keterbatasan dana. Salah satu cara untuk menjalankan pembangunan di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi adalah dengan menentukan sektor unggulan yang dapat tumbuh dan berkembang cepat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

acuan yaitu Provinsi Jawa Timur dan sektor unggulan tersebut juga diharapkan sebagai solusi alternatif untuk keluar dari krisis ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengangkat judul "Pengembangan Potensi Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi". Adapun alasan peneliti ingin mengangkat judul tersebut dikarenakan peneliti tertarik untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi dan sektor mana yang akan menjadi sektor unggulan yang dapat mengurangi masalah pengangguran di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi?
2. Apakah ada perbedaan sektor unggulan antara Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi?
3. Bagaimana peran sektor unggulan dalam pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui identifikasi sektor unggulan di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan sektor unggulan di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi
3. Untuk mengetahui peran sektor unggulan dalam pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan. Hal itu dilakukan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Penelitian berfokus pada sektor potensial di kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi dengan menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan seri 2010 tahun 2017 - 2022 Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pihak yang berkepentingan dalam pengambilan Kebijakan tentang Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

2. Bagi Universitas

Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan pusat dilingkungan kampus UPN Veteran Jawa Timur

